

STRATEGI PENJAGAAN PERBATASAN LAUT: INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENCEGAH ANCAMAN INSURJENSI DI SULAWESI UTARA

SEA BORDER STRATEGY: INDONESIA AND THE PHILIPPINES INSURGENCY PREVENTION IN NORTH SULAWESI

Pujo Widodo¹, Mardi Siswoyo², F. G. Cempaka Timur³

Prodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

Abstrak -- Strategi penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina di Kepulauan Nusa Utara selama ini pelaksanaannya dalam pencegahan, penindakan dan pemulihan belum optimal dikarenakan kurang mengidentifikasi ancaman nyata, tidak nyata dan hibrid. Penggunaan strategi yaitu pencegahan, penindakan dan pemulihan serta kerjasama mengatasi ancaman ini berupa kerjasama intelijen, diplomasi dan operasi terhambat adanya keterbatasan personel, persenjataan, perlengkapan, alat komunikasi, bahan bakar minyak dan anggaran dalam pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar pasukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan strategi pencegahan ancaman insurjensi di Sulawesi Utara baik insurjen Filipina maupun Indonesia. Teknik analisis data menggunakan *reduction, displays* dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, faktor ancaman insurjensi di Sulawesi Utara berupa ancaman nyata dari militer Filipina, ancaman tidak nyata dari insurjen Filipina dan Indonesia serta kegiatan ilegal masyarakat sapi pisang kedua negara, ancaman *hybrid* dari negara ketiga yang mendukung insurjensi. Kedua, strategi pencegahan melakukan tukar informasi, strategi penindakan hukum terhadap pelanggar kedaulatan dan kegiatan ilegal serta penenggelaman kapal / penembakan langsung. Strategi pemulihan melakukan penjagaan terhadap pembangunan nasional dan stabilitas keamanan wilayah. Ketiga, kerjasama intelijen dengan meningkatkan peran forum kominda, kerjasama diplomasi meningkatkan diplomasi secara internasional dan nasional, kerjasama operasi dengan melakukan patroli keamanan bersama, pengiriman pendidikan, latihan dan personel yang bertugas di bawah Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB).

Kata kunci: Strategi, Perbatasan, Ancaman dan Insurjensi.

Abstract -- Indonesia-Philippines marine border guarding strategy in the Nusa Tenggara Islands has been implemented in prevention, recovery and recovery has not been optimal due to lack of identifying real, unreal and hybrid threats. The use of strategies such as prevention, prosecution and restoration and cooperation to overcome these threats in the form of intelligence, diplomacy and operations are hampered by the limitations of personnel, weaponry, equipment, communication equipment, fuel oil and budget in the development of force, capability and degree of troops. The purpose of this research is to realize the prevention threat insurrenry strategy in North Sulawesi, both Filipino and Indonesian insurers. The results of this study conclude: First, insurrection threat factor in north Sulawesi in the form of real threat from the philippine military, the unreal threats of philippine and Indonesian insurers as well as the illegal activity of banana cattle community of both countries, hybrid threat from third countries that support insurrenry. Second, prevention strategies for information exchange, legal action strategies against sovereign offenders

¹ Lecturer of Asymmetric Warfare Study Program Indonesia Defense University, pujowidodo78@gmail.com

² Lecturer of Asymmetric Warfare Study Program Indonesia Defense University, siswoyomardi@gmail.com

³ Lecturer of Asymmetric Warfare Study Program, Indonesia Defense University, fgcampaka@gmail.com

and illegal activities as well as sinking of ships / direct shootings. The recovery strategy safeguards national development and regional security stability. Third, intelligence cooperation by enhancing the role of the forum of kominda, diplomacy cooperation to increase diplomacy internationally and nationally, cooperation cooperation by conducting joint security patrol, delivery of education, training and personnel under UN duty.

Keywords: Strategy, Border, Threat and Insurgency.

Latar Belakang

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menjadi ancaman insurjensi di Sulawesi Utara. Kemudian menganalisis strategi penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina dalam mencegah ancaman insurjensi di Sulawesi Utara serta menganalisis kerjasama penjagaan perbatasan laut di Kepulauan Nusa Utara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang digunakan untuk menganalisa peristiwa sosial berupa kerjasama keamanan internasional dan nasional dalam mencegah ancaman insurjensi yang disebabkan permasalahan perbatasan yang menyangkut faktor-faktor ancaman dan kerjasama mencegah ancaman serta strategi pemerintah. Sehingga obyek penelitian dalam penelitian ini adalah kerjasama penjagaan perbatasan laut oleh TNI, Pemda dan Polri serta Imigrasi dan Bea Cukai di Kepulauan Nusa Utara.

Penelitian ini difokuskan pada kerjasama penjagaan laut Indonesia-Filipina di Kepulauan Nusa Utara dan dengan pembatasan sebagai berikut:

Pertama, Waktu (time) dari tahun 2015 sd 2017. Kedua, Kegiatan (Activity) penjagaan perbatasan laut. Ketiga, Tempat (Place) di Kepulauan Nusa Utara. Selain itu, penelitian ini akan membahas strategi pemerintah dalam mencegah ancaman insurjensi Filipina dan Indonesia dengan harapan tercapainya keamanan nasional Indonesia.

Pembahasan

Faktor-faktor Ancaman Insurjensi di Sulawesi Utara

a) Ancaman nyata

Ancaman ini berupa ancaman *Armed Force of Philippine (AFP)* dan *Philippine National Police (PNP)* yang bersenjata api memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Menurut Jenderal TNI Sudirman (Alm) bahwa hakikat ancaman adalah segala sesuatu yang mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan bangsa Indonesia.

Peneliti berpendapat konsep ancaman terhadap kedaulatan Negara

memerlukan penjagaan yang ketat, khususnya keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Terdapat permasalahan kedaulatan Negara diperbatasan Laut secara internal sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan diantaranya: pertama, wilayah pertahanan merupakan tugas pokok TNI, kedua, yurisdiksi hukum merupakan tugas pokok Polri dan ketiga, wilayah administrasi pemerintah merupakan tugas pokok pemerintah daerah yang terkadang diambil alih oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan oleh pemerintah pusat. Kewenangan antisipasi persoalan ancaman luar dari tiga institusi mempunyai kepentingan tersendiri dalam hal kedaulatan.

Masalah kewenangan ini semestinya diselesaikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Konsep Barry Buzan, terdapat tiga level keamanan yaitu “*people, states and fear*” yang memasukkan sistem individu dan masyarakat, sistem negara dan sistem internasional. Konsep ini tentunya bermanfaat dalam menyelesaikan jenis-jenis ancaman, yang diidentifikasi berdasarkan ancaman nyata, tidak nyata dan hybrid

model konsep pertahanan Negara Menteri Pertahanan Ryacudu.

Menurut Ismono Wijayanto, Kategori sasaran ancaman diantaranya sasaran ancaman terhadap kedaulatan Negara berupa penguasaan atau pendudukan sebagai wilayah darat, laut dan udara atau klaim wilayah/pulau-pulau terluar Indonesia yang dilakukan oleh negara lain karena adanya konflik atau sengketa antar negara (*Inter state conflict*) yang dapat dikelompokkan sebagai ancaman militer tradisional.

Pandangan peneliti tentang ancaman kedaulatan Negara ini bisa saja Filipina dengan alasan mengejar pemberontak Bangsa Moro memasuki wilayah Indonesia dengan alasan sudah ada kerjasama. Namun, keinginannya ternyata sekaligus ingin menguasai sebagian wilayah seperti wilayah ZEE Indonesia tanpa adanya klaim terlebih dahulu atau menancapkan sebuah teknologi khusus diperbatasan laut Indonesia-Filipina dengan niat ingin menguasai sebagian kedaulatan Indonesia. Berarti ini sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata.

Berdasarkan tabel diatas penduduk Filipina sangat dipengaruhi oleh keterikatan keluarga atau Klan. Hampir sebagian besar para pejabat

politiknya mempunyai pertalian darah satu dengan yang lainnya sehingga cara melindungi kepentingannya baik bisnis maupun kekuasaan dengan jalan membentuk tentara sendiri dikenal dengan “*Private Army*”. Dengan kondisi demikian maka sering kali mengakibatkan adanya perselisihan secara meluas antar keluarga/klan yang berseberangan politik yang berakhir pada kekerasan bersenjata antara kedua belah pihak.

Khusus di wilayah Mindanao terutama di Central Mindanao yang merupakan pusat kehidupan Bangsa moro, ada beberapa keluarga/klan politik yang sangat kuat dan dapat mempengaruhi stabilitas kondisi keamanan di daerah. Persaingan klan/keluarga kesultanan, kelompok bangsa Moro dan kelompok

pemerintah sangat tinggi. Ketiga kelompok ini berusaha mempengaruhi wilayah-wilayah dekatnya untuk bergabung dan mendukung Islamic State (IS) sebagai separatis di wilayah hamper seluruh propinsi-propinsi / region-region P.Mindanao atau untuk bergabung dengan pemerintah Filipina hasil pemberian kemerdekaan (*Cessi*) dari Amerika.

Berdasarkan Teori Hans Kelsen berpendapat tentang cara-cara memperoleh wilayah dengan cara: (1) pendudukan (*Occupation*), (2) Penaklukan (*Annexation*), (3) Akresi atau gejala alam (*Accretion/Avulsion*), (4) Preskripsi (*Prescription*), (5) Cessi (*Cession*), (6) Pemilihan Umum (*Plebisit*) dan (7) Putusan Pengadilan Atau Arbitrase (*Adjudication*). Dengan demikian, peluang sebagian wilayah

Tabel 1. Jumlah Penduduk P. Mindanao / Region di Filipina

REGION	WILAYAH ADM	IBUKOTA	LUAS (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN (JIWA/KM ²)
1	2	3	4	5	6
IX Zamboanga Peninsula	Zamboanga Del Norte	Dipolog City	7,301.00	1,011,393	140
	Zamboanga Del Sur	Pagadian City	4,499.46	1,010,674	220
	Zamboanga Sibugay	Ipil	3,607.75	633,129	180
	Isabela de Basilan City	Isabela City	223.73	112,788	500
X	Bukidnon	Malaybalay City	10,498.59	1,415,226	130
	Camiguin	Mambajao	237.95	88,478	370

Northern Mindanao	Lanao Del Norte	Tubod	3,346.57	676,395	200
	Misamis Occidental	Oroquieta City	2,055.22	602,126	290
	Misamis Oriental	Cagayan De Oro City	3,131.52	888,509	280
XI Davao Region	Compostela Valley	Nabunturan	4,479.77	736,107	160
	Davao Del Norte	Tagum City	3,426.97	1,016,332	300
	Davao Del Sur	Digos City	632,588	2,163.98	290
	Davao Oriental	Mati	5,679.64	558,958	98
	Davao Occidental	Malita	2.163,45	316.342	150
	Davao City	Davao	2,443.61	1,632,991	670
XII Soccsksargen	North Cotabato	Kidapawan City	9,008.90	1,379,747	150
	Cotabato City	Cotabato	176.00	299,438	1,700
	Saranggani	Alabel	3,601.25	544,261	150
	South Cotabato	Koronadal City	3,935.95	915,289	230
	Sultan Kudarat	Isulan	5,298.34	812,095	150
XIII Caraga	Agusan del Norte	Butuan City	2,730.24	354,503	130
	Agusan Del Sur	Prosporidad	9,989.52	700,653	70
	Surigao Del Norte	Surigao City	1,972.93	485,088	250
	Surigao Del Sur	Tandag	4,932.70	592,250	120
	Dinagat Islands	San Jose	1,036.34	127,152	120
ARMM (Autonomous Region Muslim Mindanao)	Basilan	Lamitan City	1,327.23	459,367	350
	Lanao Del Sur	Marawi City	3,872.89	1,045,429	270
	Maguindanao	Buluan	4,871.60	1,173,933	240
	Sulu	Jolo	1,600.40	824,731	520
	Tawi-Tawi	Bongao	1,087.40	390,715	360

NKRI di Sulawesi utara dapat dimiliki Filipina yaitu wilayah sengketa *Batas Zone Ekonomi Eksklusif* dengan cara putusan pengadilan atau arbitrase. Dan dengan cara pemilu atau referendum melalui referendum penduduk Sapi pisang yang *undocument administration*, seperti suku kurdi

melawan empat Negara (Irak, Iran, Suriah dan Turki).

Peneliti berpendapat bahwa Peluang militer Filipina menduduki dan penaklukan wilayah kepulauan nusa utara sangat kecil karena pengakuan Internasional sudah jelas. Hanya melakukan pelanggaran kedaulatan

adalah sangat mungkin dengan alasan pengejaran kelompok pemberontak bangsa Moro melebihi perjanjian trilateral dengan Indonesia dan Malaysia. Hal lain yang perlu diwaspadai pelanggaran kedaulatan sebagai ancaman ini diantara posisi / kedudukan militer Filipina di P.Mindanao.

b) Ancaman tidak nyata

Ancaman tidak nyata berasal dari pemberontak bersenjata melawan pemerintah Filipina. Kekuatan bersenjata di Mindanao tersebar dalam berbagai kelompok. Selain *Armed Force of Philippine (AFP)* dan *Philippine National Police (PNP)* yang merupakan lembaga negara yang memiliki kekuatan bersenjata.

Terdapat kelompok-kelompok lain yang memiliki kekuatan bersenjata dari *non state actors* dan bukan lembaga Negara, yang berdampak besar pada kondisi keamanan di wilayah Mindanao. Kelompok bersenjata non-pemerintah tersebut antara lain *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, *Moro National Liberation Front (MNLF)*, *New People's Army (NPA)*, *Lawless Armed Grup* dalam hal ini diwakili oleh Ilagas, *Bangsamoro Islamic*

Freedom Fighter (BIFF), *Maute Group* dan *Abu Sayyaf Group (ASG)* serta kelompok *Private Army* yang dimiliki oleh kelompok politisi dan klan (keluarga). Kelompok tersebut meskipun secara organisasi nampak terpisah namun kenyataan di lapangan mereka terkadang berafiliasi satu dengan yang lainnya baik karena adanya keterkaitan kepentingan maupun karena faktor hubungan pertalian darah.

Ancaman ini yang paling mungkin dari semua kelompok bersenjata di P.Mindanao baik sayap politik seperti *Private Army* maupun *MNLF*, *MILF*, *BIFF*, *AKP* dan lain-lain adalah Kelompok bersenjata Bangsa Moro. Bukan berarti bangsa Moro adalah orang Filipina yang beragama Islam saja atau kelompok *Moro National Liberation Front (MNLF)*, *Bangsamoro Islamicstate Foreign Fighter (BIFF)*, *Bangsa Moro Army (BMA)* dan kelompok Maute. Tetapi klan/pertalian keluarga Islam dan Kristen yang berhubungan darah dengan warga Indonesia di kepulauan Nusa Utara, khususnya keberadaan Sapi Pisang di P.Sangihe dan Bitung (Minahasa Utara).



Gambar 1. Kota Marawi di Provinsi Lanao Del Sur P.Mindanao

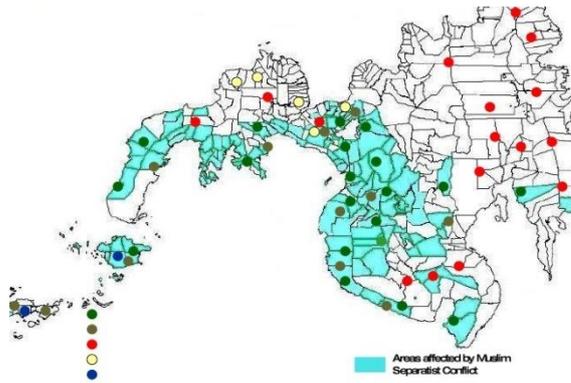
Sumber. Komjen Filipina di Manado

Gambar diatas tertulis *Moroland* merupakan wilayah yang dituntut Bangsa Moro dalam mendirikan *Islamic State* Bangsa Moro termasuk sabah Malaysia. Warna Merah dan Hijau merupakan wilayah kesultanan Sulu dan mangindanao yang sering terjadi pemberontakan melawan Filipina. Sementara itu gambar Kota Marawi bagian dari provinsi Lanao Del Sur terjadi pemberontakan tanggal 23 Mei 2017 menginginkan *Islamic State* (IS) Lanao Del Sur bukan hanya otonomi saja melainkan kemerdekaan dari penjajah bangsa Filipina.

Berdasarkan Konsep Doktrin Pertahanan Negara Dwi Bhakti Eka Dharma menyatakan untuk mengedepankan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) dalam menghadapi ancaman nirmiliter terutama yang dilakukan *non-state modern actors* dengan alasan

militer membantu pemerintah sipil (*Civil Society*). Pembuatan buku doktrin nir militer memang belum sempurna dalam buku putih. Namun, doktrin dwi bakti eka dharma versi ancaman non militer terhadap pertahanan Negara sudah ada sejak tahun 2016 berupa ancaman terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Sementara di sisi dimensi ancaman non militer yang harus dipikul oleh K/L berupa ancaman berdimensi Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan keselamatan umum serta legislasi belum dibuat doktrinnya. Oleh karena itu, peneliti memandang ancaman non militer dari Filipina berupa pemberontak Filipina yang menerobos (*Infiltration*) ke wilayah pulau-pulau terluar Sulawesi utara harus diantisipasi dengan postur pertahanan nir militer dengan cara memperkuat kekuatan, kemampuan dan gelar di seluruh perbatasan laut Indonesia-Filipina.



Gambar 2. Ancaman tidak nyata

pemberontak IS Filipina

Sumber : Komjen Filipina di Manado

Gambar diatas menunjukkan wilayah yang dipengaruhi oleh pemberontak Islamic State Bangsa Moro dengan konsentrasi wilayah timur P.Mindanao sementara wilayah barat dikuasai pemberontak komunis (NPA), Llagas dan pemberontak bersenjata lainnya yang cenderung diam dan tidak militan.

Indonesia melalui Kementerian Pertahanan sudah membuat sudah mengeluarkan buku pertahanan nirmiliter pengganti doktrin pertahanan Negara dwi bakti eka dharma yang disyahkan dengan peraturan menteri pertahanan RI Nomor 19 tahun 2016 dan disimpan dalam berita Negara RI tahun 2016 Nomor 600. Buku pertahanan nir militer tersebut menyatakan postur pertahanan nir militer meliputi

kekuatan, kemampuan, dan gelar yang dalam penyelenggaraan pertahanan nir militer berupa usaha pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan serta penggelaran kekuatan sebagai unsur utama dan unsur lain, sehingga mampu menghadapi setiap dinamika ancaman non militer yang terjadi.⁴

Menurut pendapat peneliti terdahulu Dewi mencuplik pandangan Thomas Copeland yang mengutip dari Richard Betts dalam “*Fool me twice: Intelligence Failure and Mass Casualty Terrorism*” sebagai berikut:

“Kegagalan intelijen adalah sesuatu hal yang bersifat wajar serta pernah dialami oleh semua Negara dalam hal menjaga keamanan nasionalnya, bahkan Negara-negara super power manapun.”⁵

Pendapat ini didukung oleh Wahyu Saronto tentang teori intelijen bahwa intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugas kepolisian, sebab organ intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan

⁴ Menhan, Ryamizard Ryacudu, 2016.

⁵ Dewi Kurniawati, 2012.

satunya untuk “early warning” dan “early detection”.⁶

Peneliti berpendapat konsep kekuatan, kemampuan dan gelar akan berhasil jika sudah mengetahui tentang kekuatan musuh baik disposisi maupun komposisi seperti teori sun-tzu “*You know yourself and you know the other*” ketahu musuhmu dan kekuatanmu, jika musuh lemah sehingga jalan pelarian mudah diketahui untuk dicegah. Proses mengetahui tentang ancaman pemberontak Filipina ini kuncinya berada dikemampuan intelijen dalam mencari informasi. Informasi yang didapat dan di *cross check* dengan sumber lain untuk menguji kebenaran dan tingkat kepercayaan jika benar baru menyusun rencana memperkuat, mengisi kemampuan dan mengerahkan pasukan ke perbatasan laut Indonesia-Filipina.

Identifikasi ancaman yang mungkin yaitu rute pelarian ke Indonesia, harus diketahui dan ancaman internal berupa bantuan penduduk Indonesia ke Filipina juga harus diketahui. Ada jalur rute Insurjen Filipina dan Indonesia keluar masuk wilayah Indonesia sehingga menjadi

ancaman pertahanan nir militer diantaranya: (1) Rute Manado dan Bitung menuju General Santoz P.Mindanao



Gambar 3. Rute Manado & Bitung ke General Santoz

Sumber: Kodam XIII/Merdeka

Berdasarkan gambar diatas FTF Indonesia melalui rute Sulut ke Filipina harus menggunakan 2 transport yaitu naik kapal dari Manado/Bitung ke Tahuna dengan perjalanan 1 hari. Kemudian dari Tahuna ke General Santoz menggunakan Speed Boat Nelayan perjalanan 1 hari berhenti di pulau Balut Filipina yang disambut oleh masyarakat Balut kebanyakan keluarga Sapi Pisang dengan masyarakat Sangihe. Permasalahannya banyak sekali Speed Boat nelayan baik untuk transportasi maupun untuk mencari ikan sulit diketahui jumlahnya, apalagi kondisi masyarakat cenderung

⁶ Wahyu Saronto, 2017.

bersaudara sehingga keinginan menutup diri sangat kuat. Begitu juga sebaliknya Insurjen Filipina yang memasuki pulau-pulau terluar menggunakan 2 hari perjalanan transport speed boat nelayan dan kapal transport.



Gambar 4. Sasaran Insurjen di P.Tahuna & P.Balut

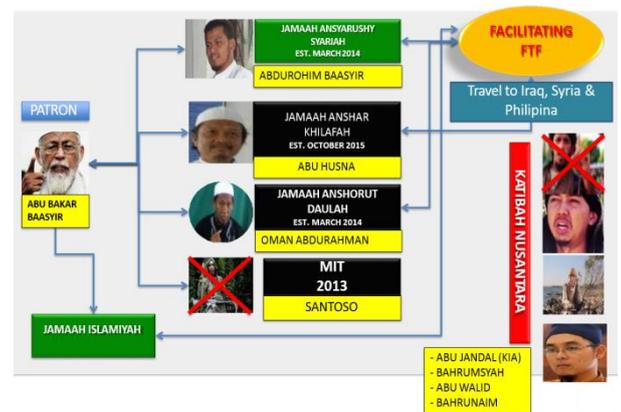
Sumber: Kodam XIII/Merdeka

Peneliti berpendapat alasan pengambilan rute itu adalah (1) jalan darat sulit dilalui karena pengawasan ketat oleh TNI, Polri, Imigrasi dan Pemda Sangihe, Talaud dan Sitaro (SaTas). (2) Rute tepi pantai dan lautan relatif lebih aman dari rute darat karena pengawasan angkutan laut dan patroli maritim Filipina sangat lemah, pengelola angkutan laut pada umumnya adalah orang-orang beragama Islam dari orang lokal setempat dan untuk mendapatkan angkutan laut sangat mudah.

Angkutan laut ini mampu membawa orang dalam jumlah banyak

sekitar 15-20 orang. (3) Pulau Balut Filipina yang mayoritas muslim dapat menerima dan memberikan bantuan kepada aktivis muslim yang berasal dari Indonesia. Dari Pulau Balut tersedia sarana angkutan laut baik yang resmi (RO RO 12) maupun yang tidak resmi (Speed Boat Pribadi) merupakan jalur tradisional hubungan masyarakat P.Balut dengan masyarakat P.Sangihe.

Permasalahan ancaman insurjen Filipina melibatkan insurjen Islamic State Indonesia yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) bersifat laten diduga berafiliasi dengan ISIS. Dengan demikian terdapat hubungan ancaman Insurjen Filipina dengan Insurjen Indonesia, yang kemudian dikaitkan dengan Negara-negara timur tengah seperti gambar dibawah ini.



Gambar 5. FTF Indonesia ke Filipina, Irak & Syria

Sumber: Kodam XIII/Merdeka

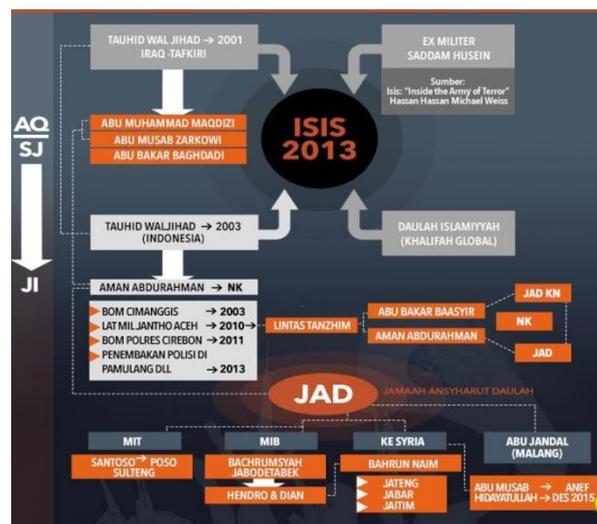
Kemudian kecurigaan terhadap pesantren ngruki terkait bom-bom

Indonesia selama ini tokoh Abu Bakar Baasyir terkait pengiriman FTF asal Indonesia, hanya Polri belum menemukan bukti yang kuat dalam pengadilan sehingga masih bebas. Perubahan perjuangan umat Islam di dunia melawan Blok Liberal dan Blok Komunis mengalami pasang surut.

Menurut peneliti terdahulu Marsetio memandang persoalan perbatasan begitu kompleks yang menyatakan pendapat sebagai berikut:

“Lemahnya pengelolaan perbatasan dan Masalah Pulau Terluar. Dimensi yang begitu luas memberikan kesulitan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan perbatasan di samping masih kurang optimalnya pemahaman dan apresiasi aparat pusat dan daerah terhadap persoalan perbatasan ini. Hal demikian, menimbulkan berbagai celah terjadinya persoalan-persoalan menyangkut persoalan sosial; pelanggaran hukum seperti perdagangan manusia, penyelundupan (barang mewah, senjata, obat terlarang), transportasi kapal ilegal, bahkan masalah terorisme”⁷

Peneliti berpendapat perubahan organisasi teror mulai dari Jemaah islamiyah yang berafiliasi dengan al-Qaeda berubah menjadi ISIS yang masih berlangsung saat ini, terdapat kegiatan FTF ISIS Indonesia dalam kegiatan aksi insurjen di Poso dan aksi teror bom-bom selama ini, seperti gambar dibawah ini.



Gambar 6. FTF Indonesia ke Filipina, Irak & Syria

Sumber: Kodam XIII/Merdeka

Permasalahan pemerintah Indonesia adalah strategi dan kerjasama masih belum optimal harus berubah menyesuaikan perubahan aksi teror yaitu sasaran teror, doktrin, rekrutmen, senjata, pola serangan dan komunikasi yang merupakan bagian dari ancaman hybrid.

⁷ Marsetio, 2013.

c) Ancaman hybrid

Berdasarkan teori Insurgensi menurut Baylis berpendapat bahwa unsur-unsur dalam tindakan insurgensi, yakni:

*“Time (waktu), space (wilayah), support (dukungan), legitimasi (politik) untuk memenangkan peperangan.”*⁸

Dalam teori ini kebanyakan insurgensi dalam posisi lemah hanya mengandalkan dukungan masyarakat dan Internasional untuk mendapatkan wilayah yang dikehendaki untuk merdeka mendirikan sebuah cita-cita Negara sendiri.

Dukungan Internasional dibutuhkan untuk mendapatkan legitimasi secara politik dan tinggal menunggu waktu kapan harus melakukan kegiatan kekerasan bersenjata yang menunjukkan bukti ada Negara dalam Negara, yang mana Negara yang tidak sebanding dan memerlukan pertolongan karena ada Negara yang belum memenuhi syarat jadi Negara sedang tertindas. Waktu tersebut biasanya pendudukan dan atau bergerak secara laten tetapi pasti menunggu pemerintah pusat lemah banyak konflik internal.

Peneliti berpendapat dalam konsep operasi bahwa suatu operasi militer untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu: pertama, Menggunakan senjata dalam rangka/hanya untuk melumpuhkan. Dalam hal ini kasus penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina disertai senjata untuk melumpuhkan jika para insurjen ini sudah mengancam masyarakat. Kedua, Menggunakan senjata dalam rangka/sampai dengan mematikan. Dalam hal ini senjata digunakan penembakan langsung jika para insurjen sudah membunuh dan membuat tidak stabil keamanan wilayah kepulauan nusa utara.

Namun, perlu ditandai bahwa insurjen kebanyakan didukung dan dilindungi oleh Negara-negara besar seperti pemberian dukungan financial dan senjata secara diam-diam. Dengan maksud menjatuhkan sebuah rezim atau penguasa pemerintah jika tidak sesuai keinginan Negara besar tersebut. Insurjen dijadikan alat penekan untuk mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan rezim penguasa seperti yang terjadi dalam

⁸ Baylis, 2002.

pemberontakan Lybia, Mesir, Irak, Suriah dan Turkey. Pemberontak dilatih dan dibiayai Negara besar.

Menurut teori Hans Kelsen menentukan suatu wilayah menjadi milik negara dengan acuan prinsip yaitu pertama, prinsip Efektivitas (*The Principle of Effectiveness*) atau keefektifitasan atas pemilikan suatu wilayah. Sikap Malaysia keinginan mengambil 10 Outstanding Border Problem di perbatasan Malaysia-Indonesia dengan mempengaruhi masyarakat perbatasan dengan fasilitas kesehatan, komunikasi, pendidikan dan pasar serta perdagangan agar masyarakat perbatasan marah terhadap pemerintah Indonesia yang membiarkan kemiskinan, keterisolasian dan pembangunan tidak merata terjadi. Kasus ini juga akan terjadi di Filipina, terdapat masyarakat perbatasan di wilayah kepulauan nusa utara yang merasa miskin, terisolasi dan pembangunan tidak merata. Bahkan keberadaan keluarga Sapi pisang yang masih belum dianggap sebagai warga Negara Indonesia maupun Filipina membuat keluarga ini mencari dukungan pemberontak untuk mendirikan Negara sendiri atau mencari dukungan dari Negara besar.

Kedua, Prinsip *Uti possidetis* yaitu prinsip yang terkait dengan perbatasan suatu negara. Prinsip ini menyatakan Negara bisa merdeka berdasarkan wilayah jajahan kolonialnya. Sementara itu wilayah nusa utara dijajah spanyol, portugis dan belanda. Kemungkinan ada alasan wilayah perebutan ini ketiga Negara membantu pemberontak, buktinya spanyol penyerahan P.Mindanao ke Amerika berdasarkan bukti cessi yang tidak menutup kemungkinan akan bernasib sama dengan wilayah kepulauan nusa utara.

Ketiga, Prinsip larangan penggunaan kekerasan (*The Prohibition of Resort to Force*). Prinsip ini diharapkan pemerintah Indonesia dan Filipina melakukan pelanggaran berat (Ham) dengan bukti-bukti membantai warga sipil sebagai alasan untuk referendum terpisah dengan NKRI mirip kasus lepasnya Timor-Timur.

Keempat, Prinsip Penyelesaian sengketa secara damai. Berbagai upaya pemerintah Filipina melakukan perdamaian dengan MNLF, MILF dan Lain-lainnya berupa pemberian otonomi sampai pembangunan wilayah. Kenyataannya Bangsa Moro tetap ingin merdeka karena ketidakadilan dalam pengambilan sumber

kekayaan alam di P.Mindanao. Perkara SKA ini melibatkan Negara-negara penjajah masa lalu yang mempunyai kepentingan terhadap kekayaan ini. Jika perundingan dengan penjajah dan Negara besar kurang memuaskan, maka peluang insurjen ini memberontak atau akan diberi kemerdekaan sangat tinggi.

Kelima, Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*). Dalam pengawasan PBB ini insurjen Filipina mempunyai kesempatan perdamaian atau konflik kembali. Jika perjanjian pengambilan sumber kekayaan alat itu ada pihak yang dirugikan maka keinginan penentuan nasib sendiri melalui PBB sangat tinggi dengan bukti hasil perdamaian tidak tercapai dan konflik lagi dengan harapan terjadi pembantaian sebagai alasan mendatangkan Tim investigasi PBB yang merekomendasikan untuk referendum.⁹

Berdasarkan teori Kedaulatan Wilayah bahwa wilayah suatu negara dapat diperluas dengan cara yaitu pertama, perluasan karena negara memperoleh wilayah baru berdasarkan cara-cara yang dikenal dalam hukum

internasional. Cara-cara ini seperti okupasi efektif, cessi, preskripsi, akresi, aneksasi dan integrasi. Pengambilan Pulau Ligitan dan Simpadan oleh Malaysia menggunakan okupasi efektif. Diantaranya penduduknya dari Malaysia, berbahasa Malaysia dan menggunakan uang ringgit. Begitu juga di perbatasan laut Indonesia-Filipina, penduduknya berbahasa tagalog, uang peso dan penduduknya masih belum diakui oleh pemerintah Indonesia (Sapi Pisang) sebagai WNI.

Kedua, perluasan yang terjadi karena terjadinya klaim-klaim atas wilayah, terutama wilayah laut. Klaim ini didorong oleh perkembangan teknologi, khususnya teknologi militer dan teknologi penambangan dasar laut samudera dalam. Teknologi ini yang berbahaya terutama USA akan memanfaatkan Filipina khususnya insurjen untuk mempengaruhi masyarakat Sangihe, Talaud dan Sitaro untuk mendukung perjuangan mendirikan Negara sendiri dengan harapan setelah menang/merdeka, kemudian mengklaim wilayah nusa utara bagian dari P.Mindanao dengan alasan wilayah jajahan spanyol dan

⁹ Hans Kelsen, (1956), *Principles of International Law*, New York: Rinehart & Co

portugis, kekerabatan dan kesultanan, serta satu rumpun etnik.

Namun, Kedaulatan Wilayah itu mempunyai pembatasan karena sifatnya kedaulatan itu tidak mutlak sehingga ada pembatasan menurut hukum internasional yaitu pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Kedua, suatu negara yang memiliki kedaulatan wilayah juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Ketiga, Kedaulatan wilayah suatu negara mencakup tiga dimensi terdiri dari tanah atau daratan yang mencakup segala yang ada di bawah dan diatas tanah tersebut, laut dan udara. Untuk pembatasan ini berupa res komunis dan terra nullius akan diambil oleh Negara besar yang mempunyai teknologi maju yaitu ruang udara bebas (antariksa) dan ruang laut diluar ZEE kedua Negara Indonesia dan Filipina.

Kebanyakan Negara besar mengamankan wilayah bekas jajahannya dengan mendirikan pangkalan militer dan kontrak kerjasama pengambilan sumber kekayaan alam, seperti kasus rohingya

di Myanmar yang mana etnik rohingya berasal dari Bangladesh dianggap menduduki tanah yang terdapat sumber minyak sehingga terjadi pengusiran terhadap penduduk Rohingya. Begitu juga terhadap penduduk di kepulauan nusa utara yang setiap saat akan diusir jika ditemukan sumber minyak dan tambang-tambang untuk keperluan Negara besar sehingga dengan alasan pemberontakan yang harus diberantas atau diusir keluar pulau-pulau itu untuk mempermudah pengambilan sumber kekayaan alam.



Gambar 7. Pangkalan Udara USA di Filipina

Sumber: Komjen Filipina di Manado

Berdasarkan gambar diatas, terlihat pangkalan militer Amerika di Filipina untuk membantu Filipina mengatasi tekanan China dan memperlancar pengambilan sumber kekayaan alam di Filipina termasuk P.Mindanao. Kontrak kemerdekaan Filipina dengan Amerika diantaranya

perjanjian kontrak karya tambang-tambang ini.

Kemudian pemerintah Filipina deklarkan keluar merasa tidak dibantu keamanan oleh Amerika masalah Laut Cina Selatan (LCS) tetapi satu sisi sudah merencanakan pembangunan bandara udara di P.Mindanao begitu banyak untuk mempercepat bantuan USA dalam pengiriman pasukan dan pengambilan SKA. Hal inilah pembangunan itu merupakan indikasi mendukung pembukaan pangkalan-pangkalan militer baru di P.Mindanao untuk membantu penyelesaian konflik pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro.

Jika pemerintah Filipina tidak menepati isi perjanjian dalam pengambilan SKA di P.Mindanao tidak menutup kemungkinan Insurjen justru dibantu senjata dan dana untuk memberontak berlarut-larut dengan tujuan rezim duterte untuk diganti dengan pengganti yang menurut dengan pemerintahan Amerika

Sebaliknya China juga membantu Filipina dalam mengatasi pemberontak dengan bantuan China, satu-sisi menekan kasus LCS berupa pulau Spratly dan paracel dengan menempatkan senjata Nuklir di P.

Hantai dan gugusan pulau-pulau kecil yang sedang direklamasi di P.Spratly dan Paracel. Tekanan ini agar Filipina mendukung China dalam penyelesaian teroris xinjiang yang berangkat jadi FTF ke Filipina. Harapan China jelas supaya memperkecil pengaruh Amerika terhadap Filipina dengan penawaran pembangunan rel kereta api cepat yang merupakan bagian dari OBOR (*One Belt One Road*) satu ikatan dan satu tujuan poros maritime jalur sutera china.

Amerika tidak kurang akal dengan permainan china tersebut, juga menawarkan poros Asia Pasifik terutama bantuan misi kemanusiaan jika terjadi gempa bumi dimana Indonesia dan Filipina masuk rangkaian Ring of Fire, jika menolak tentunya bantuan akan hilang. Hal ini dialami jepang ketika masyarakatnya menolak kehadiran tentara Amerika sehingga redisposisi ke Australia, kemudian gempa tsunami terjadi. Hal ini diluar dugaan jepang terjadi kebocoran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sehingga bantuan itu kembali kerjasama dengan Amerika.

Strategi Penjagaan Perbatasan Laut Indonesia-Filipina dalam Mencegah Ancaman Insurjensi di Sulawesi Utara

Pemerintah dalam menghadapi pelanggaran hukum berupa pelanggaran kedaulatan dan kegiatan ilegal selalu menggunakan strategi pencegahan, penindakan dan pemulihan. Berdasarkan Teori A.T. Mahan (1866-1898) tentang kekuatan laut (*Sea Power*) mempunyai 5 kategori, dimana kelima kategori untuk menguasai lautan tersebut ternyata belum sepenuhnya dilakukan oleh Indonesia-Filipina sehingga lalu lalang orang asing oleh Imigrasi dan barang oleh bea cukai belum terawasi secara ketat. Oleh karena itu sejak konflik Marawi meletus maka pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah dengan penebalan pasukan aparat keamanan dengan menambah kekuatan 1 peleton brimob dan patroli keamanan laut oleh KRI baik patroli IndoMaphil maupun patroli rutin dari Lantamal VIII/Manado. Begitu juga dengan Pemda dengan pembangunan infrastruktur berupa perkantoran dan sarana telekomunikasi untuk membantu aparat keamanan berkomunikasi.

Penebalan di jalur darat yang berada di pulau-pulau terluar khususnya dan kepulauan nusa utara umumnya dengan strategi sebagai berikut: strategi pencegahan berupa penebalan pasukan di

pulau-pulau terluar dengan menukar informasi berupa mencari indikasi infiltrasi insurjen Filipina di pulau terdepan. Salah satunya operasi Intelijen melalui Satgas Merdeka sebagaimana Surat Perintah Pangdam XIII/Merdeka Nomor Sprint/1173/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 dalam rangka melaksanakan penyelidikan terhadap kelompok ISIS Marawi Filipina di wilayah Kodam XIII/Merdeka selama 30 hari. Adapun penyelidikan dibagi menjadi beberapa daerah sasaran dengan 6 (enam) tim, masing-masing tim 2 (dua) orang yaitu Tim Tidore, Tim Tinakareng, Tim Matutuang, Tim Bitung, Tim Gorontalo Utara dan Tim Toli-Toli.

Menurut pendapat peneliti terdahulu Dewi Kurniawati¹⁰ menyampaikan tentang kegagalan intelijen yang menyangkut bom bali. Peneliti berpendapat bahwa strategi penebalan pasukan disertai memaksimalkan peran intelijen jika gagal akan mengalami pendudukan strategis mirip bom bali. Kelompok bom bali berafiliasi dengan Al Qaeda. Sejak Al Qaeda bubar karena pimpinannya Osam Bin Laden tewas, tentunya untuk saat ini bergabung dengan ISIS. Sementara itu, jaringan kelompok teror Filipina juga

¹⁰ Dewi Kurniawati, 2012

dikategorikan insurjen yang menginginkan separatistis wilayah. Oleh karena itu strategi penjagaan laut di perketat untuk jamaah tablik dan penduduk sapi pisang di wilayah kepulauan nusa utara.

Strategi penindakan berupa memaksimalkan peran hukum yang diakhiri dengan pengadilan (*Soft Power*) dengan mengedepankan cara-cara penyelesaian masalah secara damai bukan dengan cara kekerasan (*Hard Power*) kecuali insurjen melawan dan membunuh masyarakat dan aparat di perbatasan karena memegang senjata sehingga digunakan jalan akhir melakukan penembakan ditempat sesuai prosedur yang dilakukan (Protap).

Berdasarkan konsep Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang merupakan bagian dari Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) dengan prinsip tiga pilar yang sinergis yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, Pertahanan Mendalam (*Defence-in-depth*) dan Penangkalan. Konsep SPLN diawali dengan menangkal niat masuknya insurjen ke kepulauan nusa utara dengan menggunakan laporan masyarakat adanya pendatang baru. Kemudian pertahanan mendalam bersama masyarakat menghadapi insurjen yang bersenjata dan selanjutnya melakukan pengendalian laut.

Untuk sementara ini dengan belum jelasnya batas zone ekonomi eksklusif dimana area sengketa ini sering dimanfaatkan insurjen Filipina melakukan perompakan, pembajakan, penculikan dan penyanderaan. Tentunya TNI AL diharapkan dapat mengendalikan lautan setelah dibukanya jalan kerjasama dengan Filipina untuk melakukan patroli bersama. Kelemahan penindakan hukum di wilayah ZEE di perbatasan Indonesia-Filipina belum diakui secara Internasional. Hanya sebatas pengakuan kedaulatan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam.

Penindakan ini dengan melakukan pengejaran kapal, menyelidiki dan menyidik kapal-kapal illegal kemudian keputusan diserahkan pengadilan. Begitu juga menangkap oknum-oknum insurjen baik Filipina maupun Indonesia jika diketahui pelanggaran hukum yang diserahkan ke pengadilan. Sementara itu, penduduk sapi pisang yang membawa senjata dan menanam di dalam tanah jika ketangkap dimasukkan penjara sesuai prosedur hukum tetapi jika diserahkan senjata tentunya mendapat perlindungan dari pemerintah terhadap ancaman insurjen yang ada dalam penduduk.

Hans Kelsen menentukan suatu wilayah menjadi milik negara dengan

acuan prinsip yaitu pertama, prinsip Efektivitas (*The Principle of Effectiveness*) atau keefektifitasan atas pemilikan suatu wilayah. Dengan aktifnya kegiatan aksi perompakan dan penyanderaan yang disertai aksi teror di perbatasan laut menunjukkan ke internasional “ada militer bangsa moro Islamic state mempunyai wilayah yang jelas”. Oleh karena itu, strategi penindakannya harus bekerjasama dengan militer Filipina untuk mendapatkan kekuatan bisa menindak hukum di perbatasan ZEE bukan hanya sekedar eksploitasi dan eksplorasi SKA.

Kedua, Prinsip *Uti possidetis* yaitu prinsip yang terkait dengan perbatasan suatu negara. Prinsip *uti possidetis* juris ini dengan maksud Negara yang baru merdeka berdasarkan wilayah jajahan sebelumnya. Untuk sejarah Bangsa Moro merasa belum terjajah oleh Spanyol dan Amerika. Bangsa ini menganggap perjuangan kemerdekaan mengusir penjajah dari tanah P.Mindanao sehingga pemerintah Filipina dianggap sebagai bangsa penjajah. Cara menindak separatis ini harus koordinasi dengan lembaga internasional.

Ketiga, Prinsip larangan penggunaan kekerasan (*The Prohibition of Resort to Force*). Keempat, Prinsip Penyelesaian sengketa secara damai. Ketiga dan

keempat ini Indonesia mengedepankan cara-cara musyawarah mufakat dalam Pancasila sehingga bukan melalui kekerasan (Hard power) tetapi melalui perdamaian atau cara-cara politik internasional untuk menghasilkan perdamaian.

Kelima, Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*). Sebuah etnis yang tertindas dikarenakan SKA di wilayahnya diincar Negara asing. Ketidakadilan dan diskriminasi membuat bangsa moro ingin merdeka dari Filipina. Hal ini dapat dicegah dengan pemberian otonomi. Permasalahannya jabatan di pemerintahan Filipina yang terwakili bangsa moro sedikit. Cara menindak bangsa moro ini agar tidak mengembang ke Indonesia dengan memutus mata rantai generasi kekerabatan sapi pisang diperketat.

Strategi pemulihan dengan melibatkan pemerintah daerah untuk pembangunan pulau-pulau terluar, kawasan perbatasan dan daerah-daerah terpencil di kepulauan nusa utara. Adanya pembangunan berarti mengikis kemiskinan dan keterisolasian penduduk perbatasan. Otomatis penduduk akan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun jika pembangunan itu tidak merata membuat

penduduk melakukan kegiatan ilegal seperti perdagangan gelap model miras dan narkoba dengan harapan mendapatkan uang secara pintas. Dengan kenaikan kesejahteraan tentunya berpengaruh terhadap stabilitas keamanan wilayah.

Sebaliknya Negara tetangga mengalami konflik dampaknya akan mengungsi ke wilayah perbatasan laut Indonesia. Hal ini penduduk akan melaporkan keberadaannya pendatang baru itu. Sementara ini, penduduk malas laporan dikarenakan kesejahteraannya belum terjamin. Pemulihan ini dimaksud pembangunan kantor-kantor, fasilitas kesehatan, pasar, sarana pendidikan dan kesehatan agar penduduk tidak menjual hasil tangkapan ikan ke Negara Filipina.

Peran pemda sulut dalam melaksanakan pembangunan nasional harus didukung oleh aparat keamanan sehingga peredaran senjata yang bebas di wilayah Filipina tidak menjalan ke wilayah kabupaten Sangihe, Talaud dan Sitaro. Masyarakat akan merasa aman dan tidak perlu memegang senjata jika penebalan pasukan sudah pada posisi pulau-pulau terluar untuk mengantisipasi infiltrasi insurjen Filipina.

Berdasarkan teori Ken Booth yang menjelaskan tugas Angkatan laut dalam

menjaga dan mengamankan laut dalam bukunya "*Navies and Foreign Policy*" yaitu pertama, peran militer. Penggunaan kekuatan militer untuk memenangkan perang dan konflik bersenjata. Kedua, peran polisionil. Angkatan laut berperang menegakkan hukum di laut. Ketiga, peran Diplomasi. Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri maka peran angkatan laut menggunakan kekuatan laut dalam mendukung implementasi peran kementerian luar negeri. Ketiga peran itu khususnya tim pengawas orang asing (Tim Pora) sayangnya di kepulauan nusa utara kurang berjalan dengan baik terutama jumlah personel immigrasi dan bea cukai tahunan sangat terbatas sehingga tidak mampu melaksanakan fungsinya. Hanya peran Tripika dan Tripides di wilayah daratan sangat kuat. Oleh karena itu, Pemda SaTas harus mendukung rekonstruksi pembangunan infrastruktur TNI AL, Polairud, Immigrasi dan Bea Cukai agar penjagaan perbatasan laut bisa maksimal.

Selain itu, pemulihan berupa *rehabilitasi* untuk status penduduk sapi pisang apakah 2 warga Negara atau apakah tidak punya kewarga-negaraan harus memanfaatkan perjanjian bilateral dengan Filipina. Artinya memperbaharui perjanjian, khususnya hak untuk lintas

atau keluar masuk wilayah Indonesia sehingga Imigrasi dapat mengontrol jumlah sapi pisang di wilayah SaTas dan Bitung, sekaligus dapat menyelesaikan persoalan human trafficking baik pekerja Filipina maupun Indonesia di kedua Negara.

Kerjasama Diplomasi

Teori diplomasi berdasarkan Kluber sudah dilaksanakan Indonesia dengan mengkomunikasikan pengaruh aksi insurjen dan teror dari Indonesia ke Internasional untuk memecahkan bersama-sama dalam menghadapi keamanan Internasional diantaranya mengikuti kegiatan forum kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme sbb: (1) *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML)*, (2) *Financial Action Task Force*, (3) *Global Counter-Terrorism Forum (GCTF)*, (4) *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, (5) *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, (6) *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*, (7) *International Special Operations Forces (ISOF) Conference*.

Menurut pendapat Menlu, Retno Marsudi, untuk mengantisipasi penyebaran ideologi teror harus dilakukan diplomasi dengan negara Internasional.¹¹ Peneliti juga berpendapat bahwa untuk memutus mata rantai tidak hanya dengan jalan deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT maupun lembaga Narapidana di Penjara tetapi juga memutus dukungan aliran dana yang kemungkinan digunakan oleh kelompok insurjen dan teror secara bersamaan.

Sebagai contoh dukungan negara donor terbanyak mendukung aksi teror dari laporan PPATK adalah Australia. Padahal Australia sendiri aktif ikut terlibat dalam *counterterrorism*. Begitu juga aktor-aktor internasional yang simpatik dan mendukung kehidupan keluarga teroris termasuk kegiatan ilegal seperti penjualan narkoba untuk membeli senjata yang digunakan teror. Hal ini harus ada kerjasama diplomasi antar negara, khususnya Filipina dan Malaysia karena rute yang digunakan FTF Indonesia melalui wilayah negara tersebut.

Dalam kuliah umum Menlu di Unhan tahun 2017, menegaskan terdapat permasalahan permintaan aliansi pertahanan dan human trafficking di

¹¹ Tribun.News.com, 2017.

wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina. Untuk aliansi tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia Non Blok Bebas Aktif dimana Indonesia sudah memiliki sikap netral dalam kasus kepemilikan Laut Cina Selatan. Kemudian masalah *human trafficking* khususnya keberadaan TKI yang ditipu perompak Filipina untuk dipekerjakan sebagai budak sex, kelompok teroris dan tenaga suka rela nelayan-nelayan Filipina merupakan aksi penipuan yang memerlukan diplomasi dalam pembebasan dan perlindungan terhadap WNI.

Kerjasama diplomasi ini untuk mendapatkan bantuan dan menghilangkan permusuhan untuk mencapai kesepakatan dengan jalan perdamaian sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yaitu menciptakan perdamaian dunia. Kerjasama penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina memiliki harapan melalui PBB sebagai organisasi internasional memberikan informasi tentang perkembangan ISIS Irak dan suriah serta Filipina sehingga terdapat kesiapan mental bagi aktor-aktor TNI, Polri dan Pemda serta K/L dalam meningkatkan koordinasi dalam pencegahan infiltrasi insurjen Filipina di wilayah perbatasan terutama kepulauan Nusa Utara.

Cara-cara diplomasi Indonesia ke PBB dan lembaga Internasional diluar ASEAN dengan mengedepankan Soft Power dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Kerjasama ini tetap berpedoman kepada politik luar negeri (PLN) Non Blok Bebas Aktif dengan tidak membentuk Aliansi pertahanan militer tetapi mengutamakan kesepakatan dengan perjanjian tanpa kekerasan atau mengutamakan kompromi.

Permintaan negara Arab agar Indonesia terikat persekutuan pertahanan militer mengingat Indonesia banyak yang menganut paham *sunny* ditolak karena membuat Indonesia harus berblok. Dalam hal ini embargo 6 negara-negara Arab atas Qatar dengan tuduhan membiayai aksi teror ISIS suriah dan Filipina. Begitu juga penolakan Indonesia untuk membentuk pakta pertahanan dengan Filipina yang diramalkan Indonesia mendukung Filipina permasalahan Laut Cina Selatan. Menjaga posisi tetap netral dan baik sama semua negara merupakan ciri khas Indonesia menyelesaikan dengan musyawarah mufakat berpedoman pada ideologi Pancasila.

Peneliti terdahulu Marsetio (2013) berpendapat ada beberapa permasalahan perbatasan laut yang utama diantaranya: (1) Penetapan titik dasar koordinat, (2)

lemahnya pengelolaan perbatasan dan pulau terluar, (3) Kegiatan illegal khususnya para nelayan. (4) struktur masyarakat. Peneliti kemudian berpendapat bahwa kerjasama diplomasi penjagaan perbatasan laut difokuskan terhadap titik dasar koordinat agar tidak terjadi pelanggaran hukum berupa pelanggaran kedaulatan dan kegiatan illegal.

Selain itu, diplomasi dengan Filipina harus jelas dalam penindakan hukum secara (Hard Power) terhadap para penculik dan penyandera yang dilakukan oleh insurjen Filipina dari gerombolan Abu Sayyaf Group (ASG) dan pemberian status yang jelas keluarga Sapi Pisang yang selalu dituduh dukung aksi insurjen dan teror bangsa moro melawan pemerintah Filipina. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan dengan pembangunan kawasan perbatasan yang dilakukan BPPD dan Pemda harus optimal dan kontrol terhadap penduduk yang masih berkerabat dengan Filipina khususnya peran Imigrasi dan Bea Cukai harus dipertebal agar fungsi kerjasama diplomasi dengan Filipina terdukung informasi dari kerjasama TNI, Polri, Pemda dan K/L di wilayah perbatasan kepulauan nusa utara.

Diplomasi dengan Filipina dalam penyelesaian ancaman Insurjen Filipina dan Indonesia di wilayah perbatasan sulawesi utara, khususnya di kepulauan nusa utara telah dilaksanakan pertemuan trilateral diantaranya: (1) *Trilateral Meeting on Security* tanggal 22 Juni 2017 antara Filipina, Indonesia dan Malaysia, (2) *Sub-Regional Conference on FTF and Cross-Border Movement of Terrorist*, di Manado tanggal 29 Juli 2017 dihadiri 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, New Zealand dan Australia, (3) *Joint Working Group on Combating International Terrorism* di Jakarta tanggal 10 Agustus 2017 membahas perjanjian Bilateral RI-Filipina, (4) *In the Pipeline – Special ASEAN Ministerial Meeting on the Rise of Radicalization and Violent Extremism (SAMMRRVE)* tanggal 19 September 2017 di Manila.

Diplomasi dalam menyelesaikan status keluarga sapi pisang harus tahu jumlah WNI di Mindanao dan jumlah keluarga sapi pisang di Bitung. Keluarga Sapi pisang ini merupakan inti permasalahan perbatasan dari struktur sosial yang masih kekerabatan sejak era penjajahan. Pemberian ijin lintas batas yang tidak diperbarui menyebabkan kelembagaan Imigrasi dan Bea Cukai tidak mau disalahkan karena tidak

memberi ijin melainkan sejak dulu sudah ada perjanjian bilateral dengan Filipina. Oleh karena itu, MoU itu harus diperbaiki sehingga jumlah dan status kewarganegaraan jelas dan terdata baik yang indikasi mendukung insurjen atau kelompok teror.

Menurut Lord Strang, fungsi utama diplomasi adalah menyelesaikan berbagai perbedaan internasional melalui dialog dengan terciptanya saling pengertian. Peneliti berpendapat dalam mengoptimalkan kerjasama aparat keamanan dengan pemda dan K/L di wilayah perbatasan agar tidak terjadi pendudukan strategis perlu pembangunan infrastruktur masalah cyber dan alat komunikasi di wilayah perbatasan sehingga informasi hasil dialog secara internasional dapat diaplikasikan di lapangan.

Secara umum fungsi diplomasi adalah reporting, representation dan negotiation:

(1) *Reporting*. Fungsi pelaporan dimana dalam hal ini Diplomat KJRI di Davao harus melaporkan setiap kejadian mulai perdamaian sampai konflik di wilayah P. Mindanao kemudian diteruskan ke Kodam VIII/Merdeka, Lantamal VIII, Polda sulut dan Pemda Manado serta

K/L seperti Bakamla, BNPT, Imigrasi, Bea Cukai yang berada di Manado.

(2) *Representation*. Dalam hal ini peneliti berpendapat untuk mengetahui akar masalah diplomat KJRI di Davao City harus jadi penghubung 3 kesultanan terutama kesultanan sulu dan Mangindanao karena dua kesultanan itu terdapat kelompok pemberontak yang melawan pemerintah. Kesultanan sulu pernah menyerang sabah tahun 2013 dengan tuntutan wilayah sabah dikembalikan ke kesultanan sulu. Hal ini pemerintah Filipina tidak bertanggung jawab terhadap serangan itu. Oleh karena itu, ada permasalahan sejarah perjuangan bangsa moro untuk mendirikan *Islamic State* belum tuntas penyelesaiannya.

(3) *Negotiation*. Dalam *diplomacy soft power* itu mengutamakan bentuk-bentuk diplomasi seperti dialog, persidangan, konferensi internasional, kunjungan kenegaraan, seminar internasional, simposium, negosiasi dan lobby. Dalam hal ini Indonesia selalu menghubungi Filipina sejak konflik Marawi terutama keterlibatan FTF Indonesia ke Filipina dengan mengundang pemecahan masalah bersama di Indonesia baik jakarta, Manado maupun Bali.

Selain dalam bentuk komunikasi kelompok, diplomasi bisa juga berlangsung dalam bentuk komunikasi bermedia, baik media surat maupun media massa antara lain: penerangan masyarakat, hubungan masyarakat internasional, hubungan media atau hubungan pers internasional dan korespondensi diplomatik antar lembaga diplomatik.

Media-media tersebut untuk tukar informasi jika terdapat permasalahan untuk ditindak lanjuti. Permasalahan diplomasi yang belum selesai saat ini membebaskan para sandera, *human trafficking* dan status keluarga sapi pisang. Namun dengan tewasnya pimpinan Maute dan Isnilon Hapilon sebagai pimpinan ISIS di Asia Tenggara berarti peluang perdamaian dengan Bangsa Moro akan menemui titik terang. Untuk itu keterlibatan Indonesia masalah *returnees* merupakan permasalahan baru bagi Indonesia

Kesimpulan

Faktor-faktor Ancaman Insurjensi di Sulawesi Utara

Ancaman-ancaman di Sulawesi Utara yaitu:

Ancaman nyata berupa ancaman militer Filipina yang akan invasi atau memasuki kedaulatan Indonesia berupa kapal-kapal

militer dan pesawat militer dan personel militer Filipina memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin atau tanpa kerjasama militer.

Ancaman tidak nyata berupa insurjen Filipina dan insurjen Indonesia yang melintasi perbatasan laut Indonesia-Filipina. Jenis ancaman insurjen Filipina diantaranya: MNLF, MILF, BIFF, AKP, Llagas, Bangsa Moro Army, Maute dan keluarga sapi pisang asal Filipina serta pemberontak bersenjata lainnya yang memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin dengan kegiatan illegal berupa illegal fishing, perdagangan gelap (Miras dan Narkoba), penyelundupan sapi muhandak dan mendukung aksi perompakan serta tidak melaporkan keberadaannya. Sedangkan ancaman insurjen Indonesia berupa kelompok kelompok pendukung DI/TII mas lalu yang saat ini membentuk Negara Islam Indonesia (NII) yang dikenal dengan *Islamic State* (IS) terdiri dari Wahabi, pemburu aliran sesat, Hizbul Tahir, eks Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan ISIS, kelompok *Foreign Fighter* dan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF); kelompok mujahidin indonesia timur (MIT) termasuk kelompok terorist poso, NTB dan Jawa barat, dan kelompok keluarga sapi pisang asal Sangihe. Serta pengungsi

ambon/ternate dan kelompok separatis minahasa merdeka di Sulawesi Utara.

Ancaman hybrid berupa ancaman dari negara ketiga dalam hal ini adalah China, Amerika, Australia dan New Zealand serta Malaysia dan Brunei yang dicurigai mendukung aksi-aksi insurjen baik Filipina maupun Indonesia untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah yang sah Filipina dan Indonesia.

Strategi Penjagaan Perbatasan Laut Indonesia-Filipina dalam Mencegah Ancaman Insurjensi di Sulawesi Utara

Strategi penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina dengan 3 strategi yaitu:

Strategi pencegahan (*Early Warning System*) dengan melakukan pertukaran informasi melalui forum komunitas Intelijen daerah dan gelar pasukan di wilayah perbatasan dengan penebalan pasukan serta mengaktifkan komunikasi sosial agar masyarakat melaporkan setiap kedatangan orang asing dan barang di wilayahnya.

Strategi penindakan (*Hard and soft power*) dengan melakukan penindakan hukum bagi pelanggar kedaulatan dan pelanggar kegiatan ilegal, serta penindakan penenggelaman kapal-kapal jika diketahui illegal fishing setelah ditangkap, diselidiki, disidik dan hasil

pengadilan untuk ditenggelamkan serta melakukan penembakan terhadap tersangka insurjen yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah Sulawesi Utara.

Strategi Pemulihan (*Reconstruction and Rehabilitation*) dengan melakukan pembangunan nasional yang merata di kepulauan Nusa Utara yang dijaga keamanannya oleh aparat keamanan berupa pembangunan infrastruktur dan melengkapi kebutuhan teknologi telekomunikasi dan transportasi. Kemudian mendata keberadaan status sapi pisang dan membenahi hukum mulai substansi, struktur dan budaya hukum untuk mendukung stabilitas keamanan wilayah Sulawesi Utara.

Kerjasama Penjagaan Perbatasan Laut di Kepulauan Nusa Utara

Kerjasama penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina di pulau-pulau terluar dengan memanfaatkan 3 kerjasama gabungan yaitu:

a. Kerjasama Intelijen berupa meningkatkan peran forum kominda, tripika, tripides dan tim pora dalam mencegah infiltrasi insurjen Filipina dan insurjen Indonesia.

b. Kerjasama Diplomasi berupa mengajak koordinasi dan kerjasama diplomasi

secara multilateral dengan Filipina, Indonesia, Malaysia, Australia dan New Zealand. Selain itu mengaktifkan peran Indonesia dalam Asean dan organisasi OKI. Kemudian mengaktifkan koordinasi pencegahan masing-masing kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih kewenangan.

- c. **Kerjasama Operasi** berupa kerjasama patroli keamanan IndoMalphi, Corpat dan pendidikan dan latihan serta pengiriman satgas Konga XXXIV-E & F serta observer dalam mendukung kegiatan PBB untuk mengawasi jalannya perdamaian Pemerintah Filipina dengan MILF.

Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsini. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Prineka Cipta
- Huala, Adolf, 2010, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung, Keni Media
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI
- Kelsen, Hans, (1956), *Principles of International Law*, New York: Rinehart & Co
- Miles, D. (2004, 3 16). *Halabaja Revisited After 16 Years*. U.S Dept. of Defense.
- Moleong, L.J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Nasution, S. (2003). *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

